

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman, meyakinkan suatu orang atau kelompok untuk melakukan sesuatu, mengubah sikap dan pandangan, serta membangun opini publik terhadap suatu pembahasan.

Dalam konteks pemerintahan, komunikasi politik berfungsi untuk mengkoordinasi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan komunikasi politik yang baik, lancar, dan terkoordinasi maka akan menghasilkan tujuan yang diharapkan. Komunikasi politik digunakan oleh pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan bersama-sama dengan elemen masyarakat, merespon dan menyelesaikan suatu permasalahan.

Pada era pemerintahan SBY, komunikasi politik dilakukan secara formal dan terstruktur dengan menekankan peran lembaga-lembaga formal untuk melakukan fungsi komunikasi politik. Hal ini terlihat salah satunya melalui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang mengumumkan terkait kenaikan harga BBM kepada masyarakat melalui media massa. Presiden SBY dalam hal ini mengambil peran kepemimpinan di balik layar dengan mengerahkan jajarannya baik untuk melakukan komunikasi politik secara langsung.

Jika pada era pemerintahan SBY komunikasi politik dilakukan secara formal dan terstruktur, maka pada pemerintahan Jokowi cenderung menggunakan pola komunikasi politik yang informal dan dalam konteks kenaikan BBM lebih memilih menyampaikan informasi kenaikan BBM secara langsung. Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik pada pemerintahannya, presiden Jokowi mengambil peran yang lebih dominan dalam menyampaikan informasi-informasi strategis yang bersangkutan langsung dengan masyarakat. Hal ini bukan berarti bahwa presiden Jokowi sama sekali tidak mempercayai jajarannya, karena beliau juga memiliki juru bicara pemerintahan. Presiden Jokowi lebih menekankan pola pendekatan komunikasi secara langsung dengan tujuan

lebih mendapatkan kepercayaan masyarakat serta meminimalisir kesalahan dalam penyampaian informasi seputar kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Dari sekian perbedaan pola komunikasi politik antara pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi dalam menyikapi fenomena kenaikan harga BBM, terdapat kesamaan dari kedua pemerintahan dalam hubungan komunikasi politiknya kepada masyarakat. Selain pola komunikasi vertikal, terdapat pola komunikasi sirkuler antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya antara masyarakat dengan pemerintah. Pola komunikasi sirkuler ini dapat terjadi karena Indonesia dengan sistem politik negara demokrasinya membuka ruang bagi adanya reaksi dari masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Reaksi ini direpresentasikan melalui beragam aksi demonstrasi masyarakat kepada pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi dalam fenomena kenaikan harga BBM.

